

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



APBD

Drs. Bambang Wisnu Handoyo
DPPKA DIY

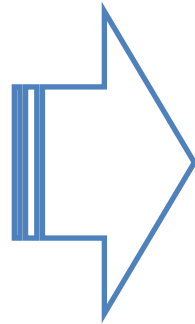
KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, & pengawasan keuangan daerah.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

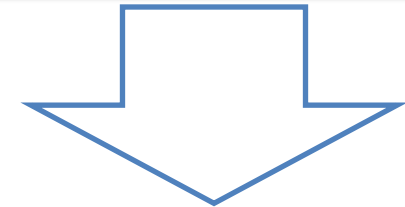
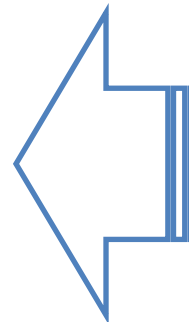
**KEUANGAN DAERAH
(PP No 58/2005)**



semua **hak** dan **kewajiban** daerah dalam rangka **penyelenggaraan pemerintahan daerah** yang dapat dinilai dengan uang

AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA



APBD

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Tertib

- bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Taat

- bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efisien

- merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis

- merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif

- merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil

Transparan

- merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah

Bertanggung jawab

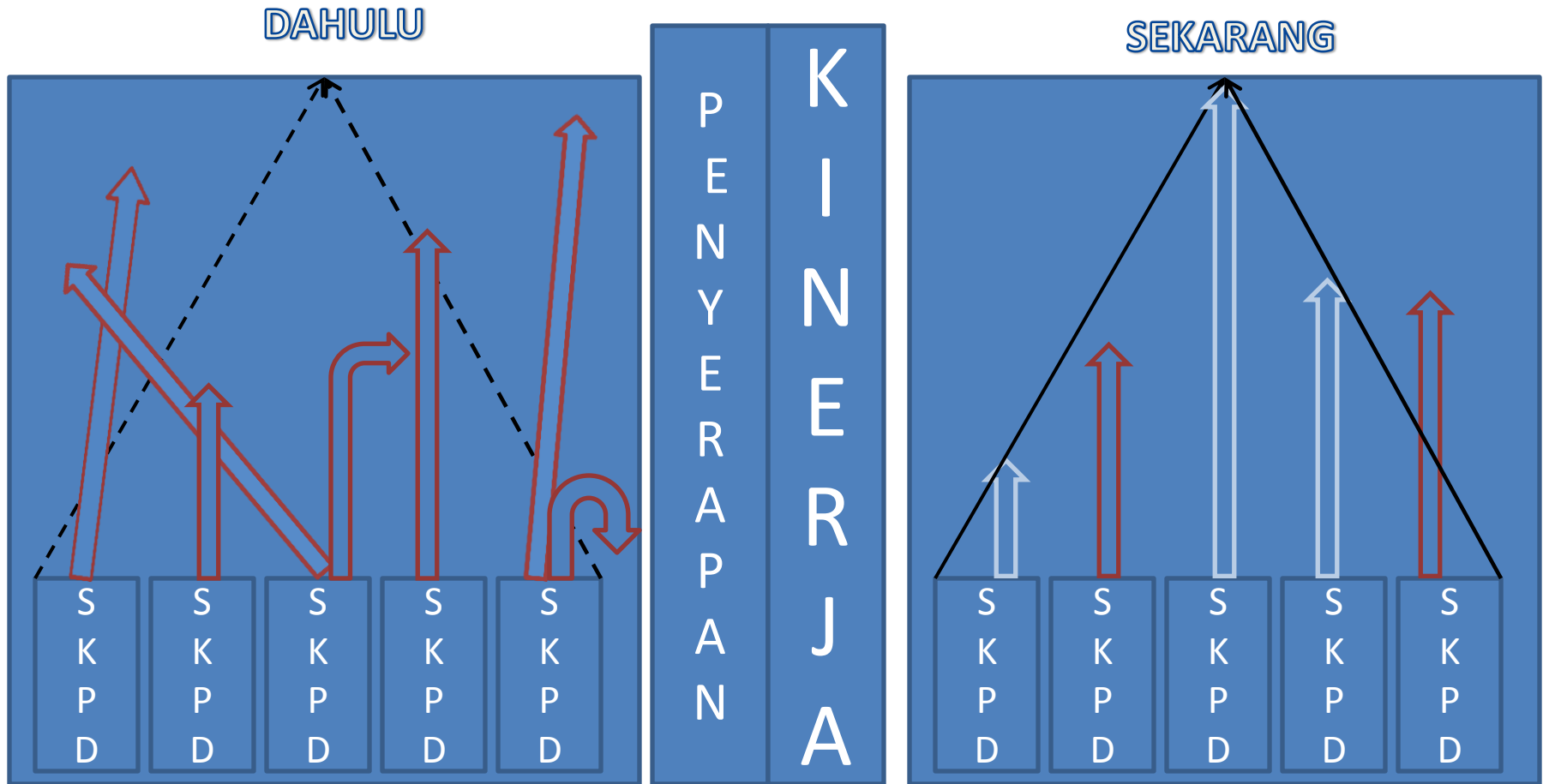
- merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan

- keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif

Kepatutan

- tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional



Kesimpulan :

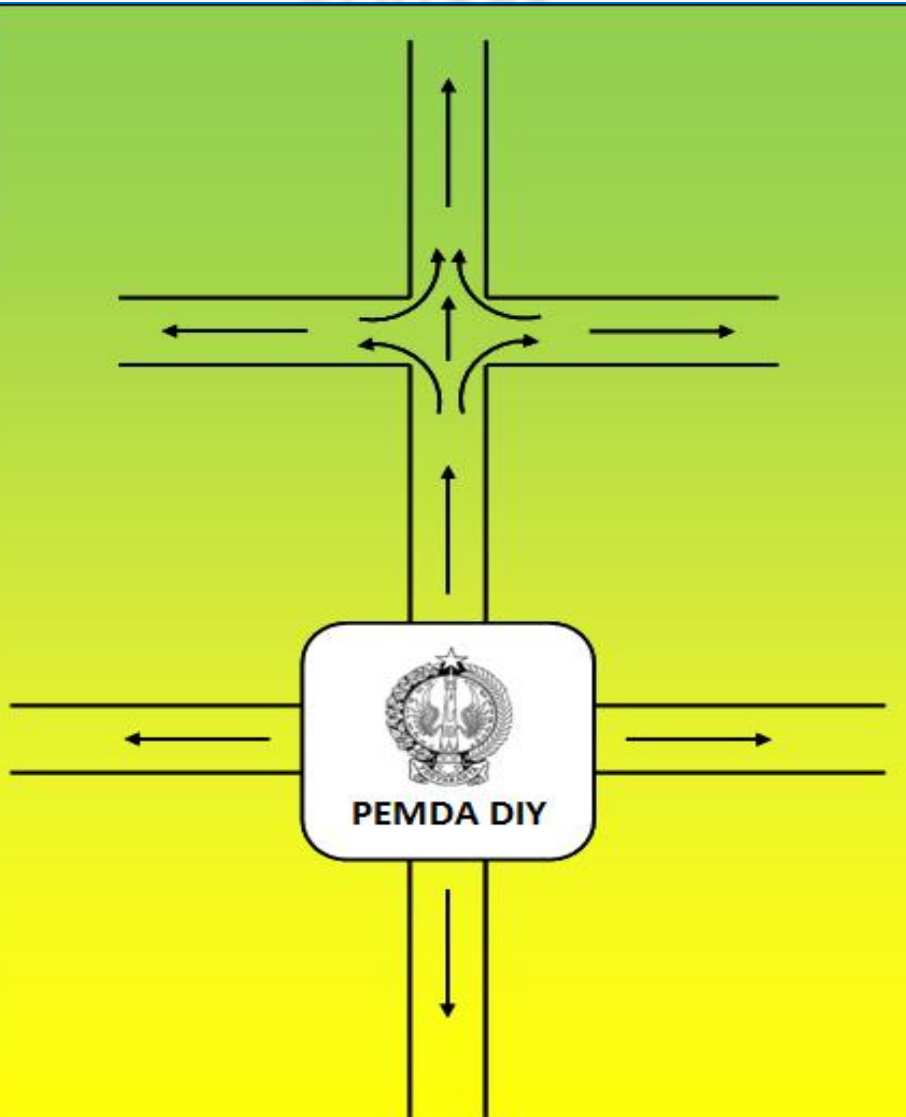
Mulai tahun 2006 Diperkenalkan Target Kinerja

Target Kinerja Lebih Tertata

- ❖ Fokus pada hasil dan dampak
- ❖ Fokus pada pengukuran Prestasi Kerja
- ❖ Tertintegrasi dengan proses dan biaya input
- ❖ Memperkenalkan keuangan tahun jamak.
- ❖ Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi
- ❖ Sangat fleksibel dan lebih terdesentralisasi

ARAH YANG MAU DITUJU (sebagai pelayan masyarakat)

DAHULU



PERBAIKAN



IDEAL

TUJUAN :

UMUM

- MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
- MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
- MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
- IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA

KHUSUS

- MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
- MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
- SARANA PENDIDIKAN POLITIK TINGKAT LOKAL



STRUKTUR APBD

1. PENDAPATAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.2. DANA PERIMBANGAN

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

2. BELANJA

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.2. BELANJA LANGSUNG

3. PEMBIAYAAN

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

GAMBARAN UMUM APBD PEMDA DIY TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2016	LRA Tahun 2016 (unaudited)	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.643.358.958.571,80	1.673.610.149.905,08	30.251.191.333,28
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.732.575.255.000,00	1.697.108.535.480,00	(35.466.719.520,00)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	529.732.089.296,00	528.335.253.312,00	(1.396.835.984,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.905.666.302.867,80	3.899.053.938.697,08	(6.612.364.170,72)
2.	BELANJA			
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.077.792.555.106,60	1.998.595.549.413,17	(79.197.005.693,43)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.962.056.175.779,00	1.849.367.416.433,55	(112.688.759.345,45)
	JUMLAH BELANJA	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	(191.885.765.038,88)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(134.182.428.017,80)	51.090.972.850,36	185.273.400.868,16
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	364.682.428.017,80	370.879.687.992,80	6.197.259.975,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	230.500.000.000,00	230.000.000.000,00	(500.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETO	134.182.428.017,80	140.879.687.992,80	6.697.259.975,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	191.970.660.843,16	191.970.660.843,16

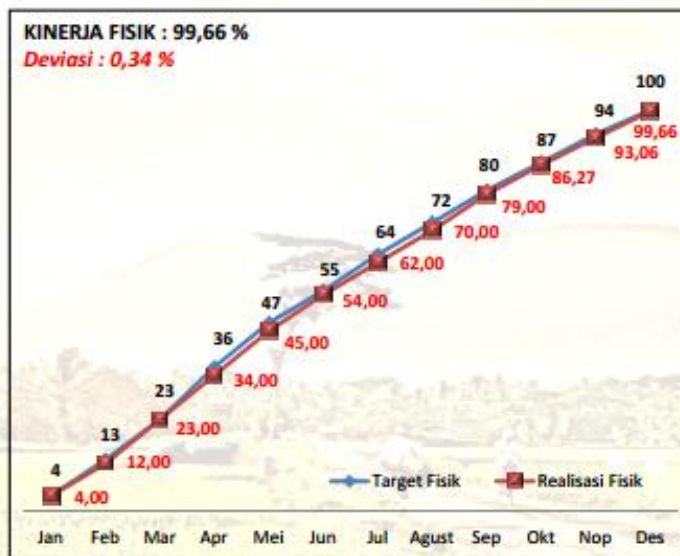
Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	3.905.666.302.867,80	3.899.053.938.697,08	(6.612.364.170,72)	99,83
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.643.358.958.571,80	1.673.610.149.905,08	30.251.191.333,28	101,84
4.1.1.	Pajak Daerah	1.424.186.479.922,00	1.440.571.518.513,00	16.385.038.591,00	101,15
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	37.637.651.033,00	36.603.883.321,00	(1.033.767.712,00)	97,25
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.368.821.720,85	57.336.115.845,38	(32.705.875,47)	99,94
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	124.166.005.895,95	139.098.632.225,70	14.932.626.329,75	112,03
4.2.	Dana Perimbangan	1.732.575.255.000,00	1.697.108.535.480,00	(35.466.719.520,00)	97,95
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	123.533.815.000,00	113.065.428.524,00	(10.468.386.476,00)	91,53
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	940.835.434.000,00	940.835.434.000,00	0,00	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	668.206.006.000,00	643.207.672.956,00	(24.998.333.044,00)	96,26
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	529.732.089.296,00	528.335.253.312,00	(1.396.835.984,00)	99,74
4.3.1.	Pendapatan Hibah	10.934.617.600,00	9.537.781.616,00	(1.396.835.984,00)	87,23
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	518.205.064.166,00	518.205.064.166,00	0,00	100,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	592.407.530,00	592.407.530,00	0,00	100,00
	JUMLAH	3.905.666.302.867,80	3.899.053.938.697,08	(6.612.364.170,72)	99,83
5.	BELANJA	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	(191.885.765.038,88)	95,25
5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.077.792.555.106,60	1.998.595.549.413,17	(79.197.005.693,43)	96,19
5.1.1.	Belanja Pegawai	586.441.600.516,37	570.939.444.554,50	(15.502.155.961,87)	97,36
5.1.4.	Belanja Hibah	739.110.270.983,00	727.099.422.000,00	(12.010.848.983,00)	98,37
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.683.000.000,00	1.919.000.000,00	(764.000.000,00)	71,52

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	611.852.157.746,18	611.852.157.038,67	(707,51)	100,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	87.863.277.816,00	86.724.507.820,00	(1.138.769.996,00)	98,70
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	49.842.248.045,05	61.018.000,00	(49.781.230.045,05)	0,12
5.2.	Belanja Langsung	1.962.056.175.779,00	1.849.367.416.433,55	(112.688.759.345,45)	94,26
5.2.1.	Belanja Pegawai	144.668.401.677,00	136.962.744.352,00	(7.705.657.325,00)	94,67
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	954.771.140.045,00	875.530.959.902,20	(79.240.180.142,80)	91,70
5.2.3.	Belanja Modal	862.616.634.057,00	836.873.712.179,35	(25.742.921.877,65)	97,02
	JUMLAH	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	(191.885.765.038,88)	95,25
	SURPLUS/(DEFISIT)	(134.182.428.017,80)	51.090.972.850,36	185.273.400.868,16	(38,08)
6.	PEMBIAYAAN	134.182.428.017,80	140.879.687.992,80	6.697.259.975,00	104,99
6.1.	Penerimaan	364.682.428.017,80	370.879.687.992,80	6.197.259.975,00	101,70
6.1.1.	Pembiayaan Daerah				
6.1.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	364.682.428.017,80	364.682.428.017,80	0,00	100,00
6.1.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	6.197.259.975,00	6.197.259.975,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	364.682.428.017,80	370.879.687.992,80	6.197.259.975,00	101,70
6.2.	Pengeluaran	230.500.000.000,00	230.000.000.000,00	(500.000.000,00)	99,78
6.2.2.	Pembiayaan Daerah				
6.2.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	230.500.000.000,00	230.000.000.000,00	(500.000.000,00)	99,78
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	230.500.000.000,00	230.000.000.000,00	(500.000.000,00)	99,78
	PEMBIAYAAN NETTO	134.182.428.017,80	140.879.687.992,80	6.697.259.975,00	104,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	191.970.660.843,16	191.970.660.843,16	0,00

KINERJA APBD (26 JANUARI 2017)



KINERJA FISIK DAN KEUANGAN PEMDA DIY 2016 (SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV)



REALISASI KINERJA FISIK DAN KEUANGAN SELAMA 2013 – 2016 :



- Progres kinerja fisik cenderung dapat dipertahankan, sedangkan kinerja keuangan semakin meningkat selama 2013-2016

KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) :

1. Seluruh Paket

Jumlah paket	Paket Selesai Lelang	Jumlah pagu paket (dalam nilai Rp)	Pagu paket yang selesai lelang (Rp)
585	574	668.781.878.720	664.884.208.720

2. Per Jenis Belanja

No	Jenis Pengadaan	Jumlah paket seluruhnya	Jumlah Paket masuk	Jumlah paket selesai lelang	Gagal lelang	% Ketercapaian
1	Barang	126	126	122	4	97 %
2	Jasa Lainnya	62	62	59	3	95 %
3	Konstruksi	161	161	161	0	100 %
4	Jasa Konsultansi	236	236	232	4	98 %
	Jumlah Total	585	585	574	11	98 %

TINGKAT KETERCAPAIAN PBJ SELAMA 2014-2016 :



- Tingkat ketercapaian PBJ pada 2016 mencapai 98 %. Capaian itu sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
- Adanya paket gagal lelang, lebih disebabkan adanya dampak dari kebijakan efisiensi (pengadaan benih tebu pada Dishutbun, pengadaan barang & bahan untuk perbanyakan induk udang galah di Dislautkan, jasa konsultasi di BPAD), ditarik oleh SKPD karena pertimbangan teknis (pengadaan shuttle bus di Dishub, jasa konsultasi software di BPAD, pengadaan pengiriman peserta pelatihan PPGD) dan perubahan metodologi menjadi belanja non lelang (kajian pengurangan resiko bencana di Bappeda, pembuatan film pangan lokal di BKPP, promosi TV Bandara di Dispar)

CATATAN :

- Adanya **kebijakan efisiensi** memiliki dampak terhadap rasionalisasi sejumlah belanja, seperti : penundaan pembelian kendaraan dinas, pengurangan volume rapat, penundaan FGD/Sosialisasi, penundaan sejumlah event/pameran/expo, dan pengurangan volume perjalanan dinas
- Adanya **moratorium seleksi CPNS**, menjadi kendala dalam kinerja di BKD DIY
- Pelaksanaan **pemberian hibah**, masih belum optimal berkaitan dengan kelompok calon penerima yang masih belum memenuhi syarat, sebagaimana terjadi pada Dinas Perindag dan Dinas Koperasi UMKM. Adapun skema hibah pada Dinas Pertanian dialihkan melalui skema APBN, sehingga kelompok penerima hibah dapat terfasilitasi pada tahun 2016
- Adanya **penundaan softlaunching Pelabuhan Tanjung Adikarta**, berkaitan dengan kondisi alur masuk pelabuhan yang tidak memadai untuk kapal >5 GT, sehingga aktivitas tersebut menunggu hasil *review design* yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Dislautkan DIY (PPP Sadeng).
- **Penurunan produksi minyak kayu putih** karena faktor iklim kemarau basah sepanjang tahun 2016, yang menyebabkan proses produksi tidak optimal (target panen daun kayu putih dan produksi minyak kayu putih tidak tercapai) dan kualitas minyak kayu putih menjadi turun. Hal itu berdampak terhadap menurunnya PAD dari hutan produksi minyak kayu putih
- Adanya **penyesuaian kewenangan**, yang berdampak terhadap tidak tercapainya output :
 - 1) Belum optimalnya **UPT Balai P3ESDM** di Dinas PUP ESDM DIY, berdampak terhadap kinerja fisik & keuangan karena belum ada SDM yang mengisinya. Akibatnya belanja untuk operasionalisasi UPT tersebut menjadi tidak optimal
 - 2) Adanya fakta bahwa keberadaan **SAR Satlinmas tidak lagi menjadi kewenangan Badan Kesbangpol DIY** sehingga pembangunan kamar mandi Posko di waduk Sermo dan perbaikan ruang atas Posko Pantai Baron tidak direalisasikan.

KENDALA-KENDALA REALISASI APBD

- Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Kesiapan SDM dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana belanja dan kegiatan yang diprioritaskan.
- Orientasi sebagian program dan kegiatan masih parsial sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang ditimbulkan.
- Ketidakpastian pelaksanaan transfer pusat ke daerah.
- Regulasi urusan Keistimewaan, kesiapan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota terkait dengan pengambilan keputusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan waktu verifikasi laporan kinerja.
- Regulasi Pemerintah (Pengaturan Hibah, Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa, Juklak dan Juknis serta Mekanisme Transfer)

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- Peningkatan koordinasi kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- Penungkatan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- Peningkatan sinergitas dan koordinasi Pendapatan Asli Daerah dengan pemerintah pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
- Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi.

GAMBARAN UMUM APBD TA 2017

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2017
1	2	3
1.	PENDAPATAN	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.657.147.882.128,63
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.461.741.043.739,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	869.490.391.847,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63
2.	BELANJA	
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.779.012.765.965,93
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.421.373.245.035,50
	JUMLAH BELANJA	5.200.386.011.001,43
	SURPLUS/(DEFISIT)	(212.006.693.286,80)
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	216.006.693.286,80
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	212.006.693.286,80
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

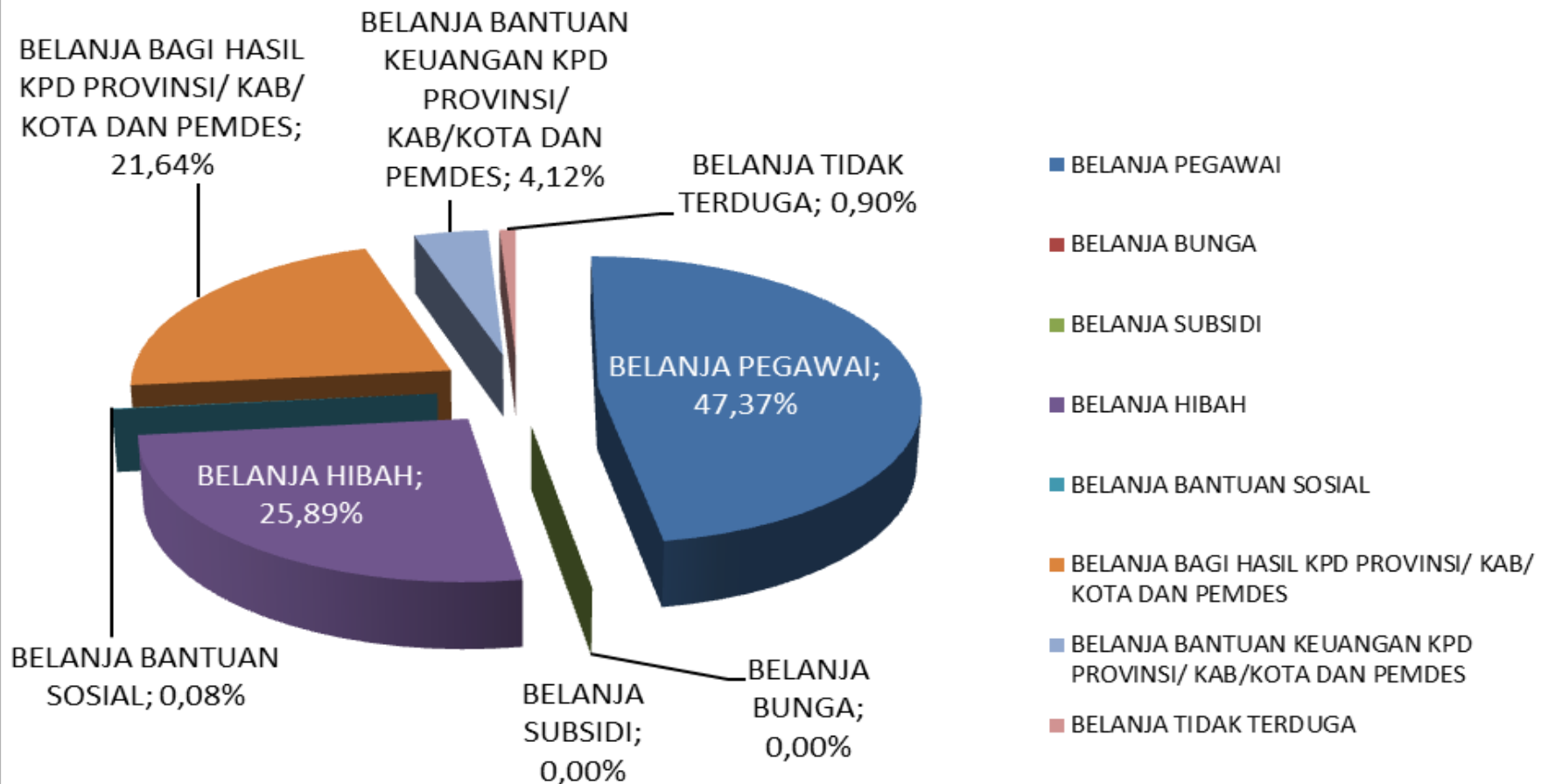
Hal : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.657.147.882.128,63
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1.437.942.970.424,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	38.797.469.715,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	59.711.579.867,44
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	120.695.862.122,19
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.461.741.043.739,00
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	132.300.017.047,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.380.356.647.692,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	949.084.379.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	869.490.391.847,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	14.827.192.847,00
1.3.2.	DANA DARURAT	0,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	853.998.349.000,00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	664.850.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63

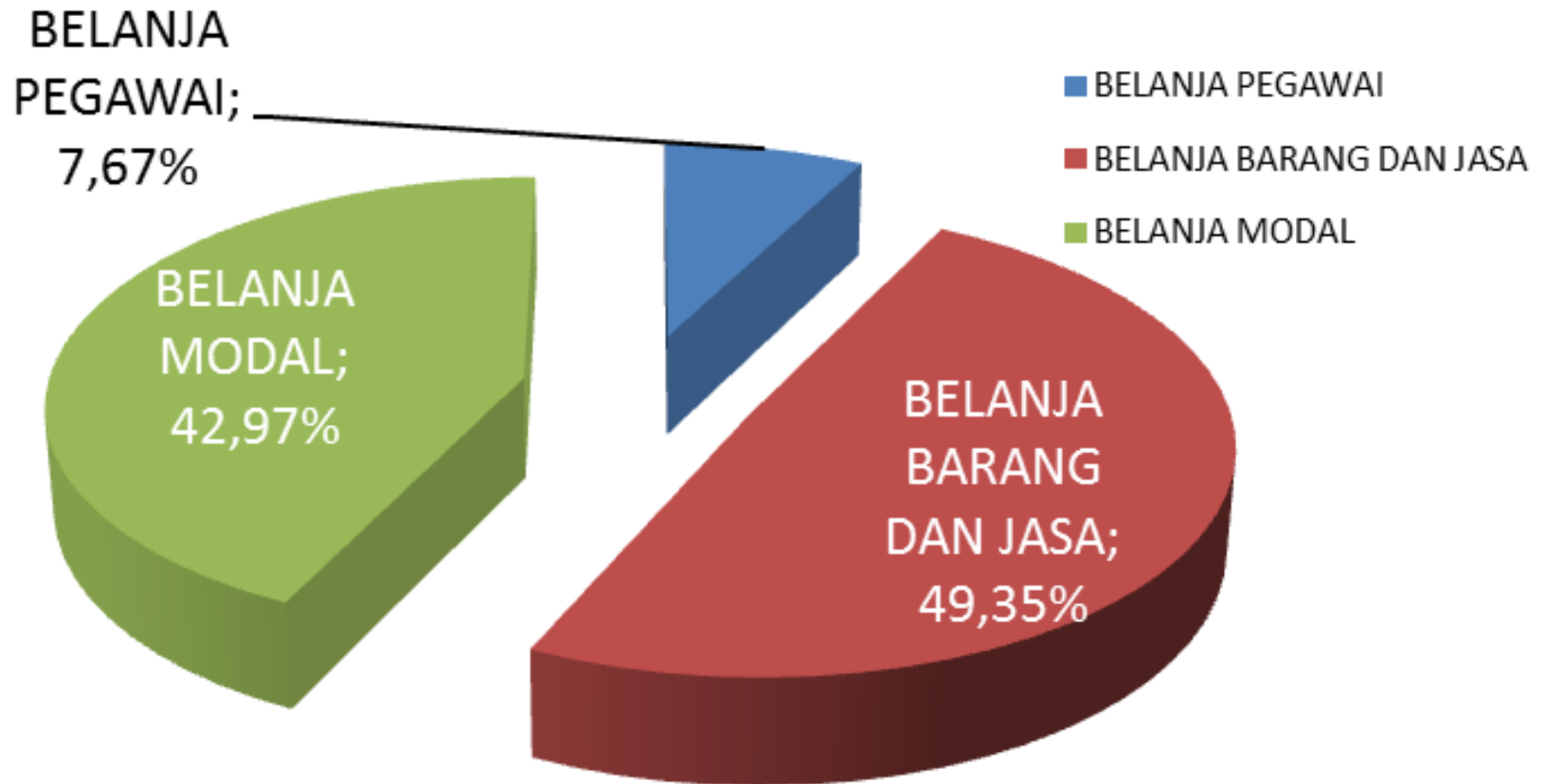
2.	BELANJA	5.200.386.011.001,43
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.779.012.765.965,93
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.316.547.064.995,93
2.1.2.	BELANJA BUNGA	0,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	719.522.034.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.091.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMDES	601.307.079.296,80
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMDES	114.625.862.931,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.919.724.742,20
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.421.373.245.035,50
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	185.780.385.232,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.195.029.682.728,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	1.040.563.177.075,50
	JUMLAH BELANJA	5.200.386.011.001,43
	SURPLUS/(DEFISIT)	(212.006.693.286,80)

3.	PEMBIAYAAN	212.006.693.286,80
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	216.006.693.286,80
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	216.006.693.286,80
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00
3.1.3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0,00
3.1.6.	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00
3.1.7.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR	0,00
3.1.8.	PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.006.693.286,80
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00
3.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	4.000.000.000,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0,00
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00
3.2.5.	PENYELESAIAN KEGIATAN D P A - L	0,00
3.2.6.	PEMBAYARAN KEWAJIBAN TAHUN LALU YANG BELUM TERSELESAIKAN	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	212.006.693.286,80
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2017



KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG APBD TA 2017



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 1

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN KONKUREN WAJIB	64.357.649.747,00	950.971.381.244,00	1.967.734.562.138,50	2.918.705.943.382,50
1.01.	PENDIDIKAN	2.965.466.000,00	773.397.803.507,00	413.099.484.660,00	1.186.497.288.167,00
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.965.466.000,00	773.397.803.507,00	413.099.484.660,00	1.186.497.288.167,00
1.02.	KESEHATAN	30.919.357.007,00	44.319.042.138,00	132.176.382.928,50	176.495.425.066,50
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	8.919.357.007,00	17.809.767.754,00	91.414.610.335,00	109.224.378.089,00
1.02.02.	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	17.500.000.000,00	17.240.191.684,00	24.830.626.993,50	42.070.818.677,50
1.02.03.	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	4.500.000.000,00	9.269.082.700,00	15.931.145.600,00	25.200.228.300,00
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.668.685.600,00	26.596.026.631,00	645.402.572.200,00	671.998.598.831,00
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	4.668.685.600,00	24.082.386.410,00	299.818.467.200,00	323.900.853.610,00
1.03.02.	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	-	2.513.640.221,00	345.584.105.000,00	348.097.745.221,00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	15.490.041.567,00	31.987.835.504,00	47.477.877.071,00
1.05.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	4.388.780.451,00	5.242.723.769,00	9.631.504.220,00
1.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	8.084.878.998,00	9.765.532.560,00	17.850.411.558,00
1.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3.016.382.118,00	16.979.579.175,00	19.995.961.293,00
1.06.	SOSIAL	420.000.000,00	18.427.962.568,00	45.632.689.125,00	64.060.651.693,00
1.06.01.	DINAS SOSIAL	420.000.000,00	18.427.962.568,00	45.632.689.125,00	64.060.651.693,00
1.07.	TENAGA KERJA	869.295.000,00	16.538.044.212,00	29.433.127.050,00	45.971.171.262,00
1.07.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	869.295.000,00	16.538.044.212,00	29.433.127.050,00	45.971.171.262,00
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	-	4.519.723.408,00	30.390.557.875,00	34.910.281.283,00
1.08.01.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	-	4.519.723.408,00	30.390.557.875,00	34.910.281.283,00
1.09.	PANGAN	-	5.207.980.440,00	8.271.787.200,00	13.479.767.640,00
1.09.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	-	5.207.980.440,00	8.271.787.200,00	13.479.767.640,00

1.11.	LINGKUNGAN HIDUP	-	3.480.749.522,00	20.644.044.500,00	24.124.794.022,00
1.11.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	3.480.749.522,00	20.644.044.500,00	24.124.794.022,00
1.15.	PERHUBUNGAN	22.887.372.140,00	12.783.089.563,00	130.323.406.325,00	143.106.495.888,00
1.15.01.	DINAS PERHUBUNGAN	22.887.372.140,00	12.783.089.563,00	130.323.406.325,00	143.106.495.888,00
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	4.812.501.309,00	13.658.165.025,00	18.470.666.334,00
1.16.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	4.812.501.309,00	13.658.165.025,00	18.470.666.334,00
1.17.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	2.770.247.072,00	8.298.682.930,00	11.068.930.002,00
1.17.01.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	2.770.247.072,00	8.298.682.930,00	11.068.930.002,00
1.18.	PENANAMAN MODAL	1.090.760.000,00	3.765.090.026,00	9.407.630.800,00	13.172.720.826,00
1.18.01.	BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL	-	2.647.857.212,00	6.249.241.000,00	8.897.098.212,00
1.18.02.	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	1.090.760.000,00	1.117.232.814,00	3.158.389.800,00	4.275.622.614,00
1.22.	KEBUDAYAAN	336.714.000,00	10.780.349.846,00	392.994.933.400,00	403.775.283.246,00
1.22.01.	DINAS KEBUDAYAAN	336.714.000,00	10.780.349.846,00	392.994.933.400,00	403.775.283.246,00
1.23.	PERPUSTAKAAN	200.000.000,00	8.082.729.435,00	56.013.262.616,00	64.095.992.051,00
1.23.01.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	200.000.000,00	8.082.729.435,00	56.013.262.616,00	64.095.992.051,00
2.	URUSAN KONKUREN PILIHAN	10.843.856.295,00	69.046.977.234,00	140.428.994.637,00	209.475.971.871,00
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.452.330.325,00	8.930.305.833,00	39.200.945.760,00	48.131.251.593,00
2.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.452.330.325,00	8.930.305.833,00	39.200.945.760,00	48.131.251.593,00
2.02.	PARIWISATA	87.089.220,00	3.822.595.691,00	28.295.001.500,00	32.117.597.191,00
2.02.01.	DINAS PARIWISATA	87.089.220,00	3.822.595.691,00	28.295.001.500,00	32.117.597.191,00
2.03.	PERTANIAN	1.321.535.750,00	22.594.146.524,00	35.412.841.101,00	58.006.987.625,00
2.03.01.	DINAS PERTANIAN	1.321.535.750,00	22.594.146.524,00	35.412.841.101,00	58.006.987.625,00
2.04.	KEHUTANAN	7.832.901.000,00	24.211.124.499,00	19.960.490.126,00	44.171.614.625,00
2.04.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	7.832.901.000,00	24.211.124.499,00	19.960.490.126,00	44.171.614.625,00
2.06.	PERDAGANGAN	150.000.000,00	9.488.804.687,00	17.559.716.150,00	27.048.520.837,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000,00	9.488.804.687,00	17.559.716.150,00	27.048.520.837,00

4.	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN	4.913.177.811.672,63	1.758.994.407.487,93	313.209.688.260,00	2.072.204.095.747,93
4.01.	OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM	450.000.000,00	63.829.367.233,00	163.777.967.975,00	227.607.335.208,00
4.01.01.	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	-	2.685.553.230,00	-	2.685.553.230,00
4.01.02.	SEKRETARIAT DAERAH	-	25.788.076.484,00	69.177.074.075,00	94.965.150.559,00
4.01.03.	SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA	-	855.709.672,00	451.000.000,00	1.306.709.672,00
4.01.04.	KANTOR PERWAKILAN DAERAH	450.000.000,00	1.208.026.428,00	4.403.920.250,00	5.611.946.678,00
4.01.05.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	22.371.935.000,00	-	22.371.935.000,00
4.01.06.	SEKRETARIAT DPRD	-	5.597.480.064,00	82.297.724.650,00	87.895.204.714,00
4.01.07.	INSPEKTORAT	-	5.322.586.355,00	7.448.249.000,00	12.770.835.355,00
4.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	7.037.731.336,00	16.993.320.995,00	24.031.052.331,00
4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	7.037.731.336,00	16.993.320.995,00	24.031.052.331,00
4.03.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	4.903.784.411.672,63	1.554.222.343.539,93	98.030.172.700,00	1.652.252.516.239,93
4.03.01.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	1.572.552.976.086,63	91.756.642.569,93	98.030.172.700,00	189.786.815.269,93
4.03.02.	PPKD/BUD	3.331.231.435.586,00	1.462.465.700.970,00	-	1.462.465.700.970,00
4.04.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.943.400.000,00	133.904.965.379,00	34.408.226.590,00	168.313.191.969,00
4.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.453.400.000,00	128.946.068.933,00	18.022.074.890,00	146.968.143.823,00
4.04.02.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.490.000.000,00	4.958.896.446,00	16.386.151.700,00	21.345.048.146,00
Jumlah		4.988.379.317.714,63	2.779.012.765.965,93	2.421.373.245.035,50	5.200.386.011.001,43
SURPLUS / (DEFISIT)		(212.006.693.287)			

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan Netto	
1	2	3	4	5	6
4.	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN	216.006.693.286,80	4.000.000.000,00	212.006.693.286,80	0,00
4.03.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	216.006.693.286,80	4.000.000.000,00	212.006.693.286,80	0,00
4.03.02.	PPKD/BUD	216.006.693.286,80	4.000.000.000,00	212.006.693.286,80	0,00

KAB. MAGELANG
PROV. JATENG

TN. Merapi

KAB. BOYOLALI
PROV. JATENG



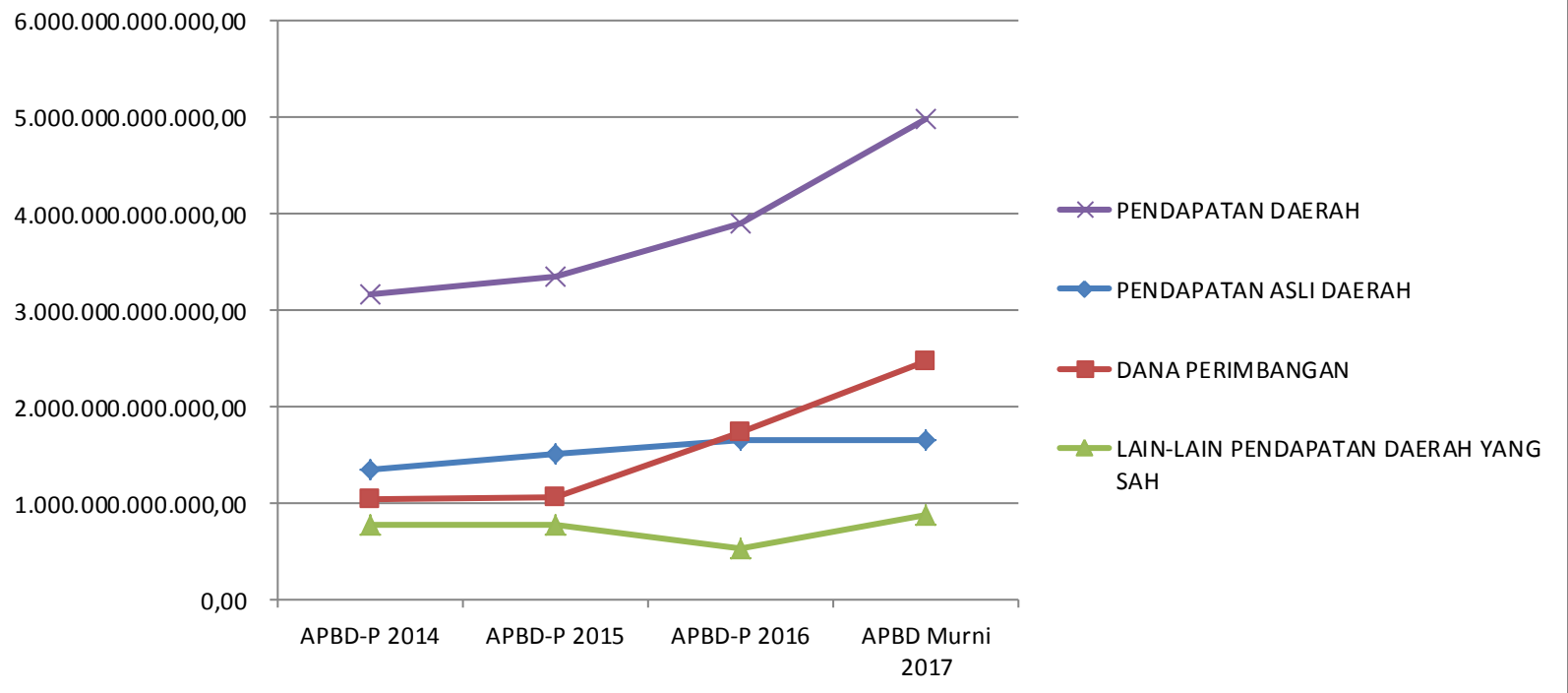
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH



PENDAPATAN DAERAH

Perkembangan Pendapatan Daerah DIY Tahun 2014 – 2017

	PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
APBD-P 2014	3.155.760.939.182,27	1.342.290.475.580,27	1.046.227.488.649,00	767.242.974.953,00
APBD-P 2015	3.357.761.886.230,77	1.518.860.030.656,77	1.056.608.866.160,00	782.292.989.414,00
APBD-P 2016	3.905.666.302.867,80	1.643.358.958.571,80	1.732.575.255.000,00	529.732.089.296,00
APBD Murni 2017	4.988.379.317.714,63	1.657.147.882.128,63	2.461.741.043.739,00	869.490.391.847,00

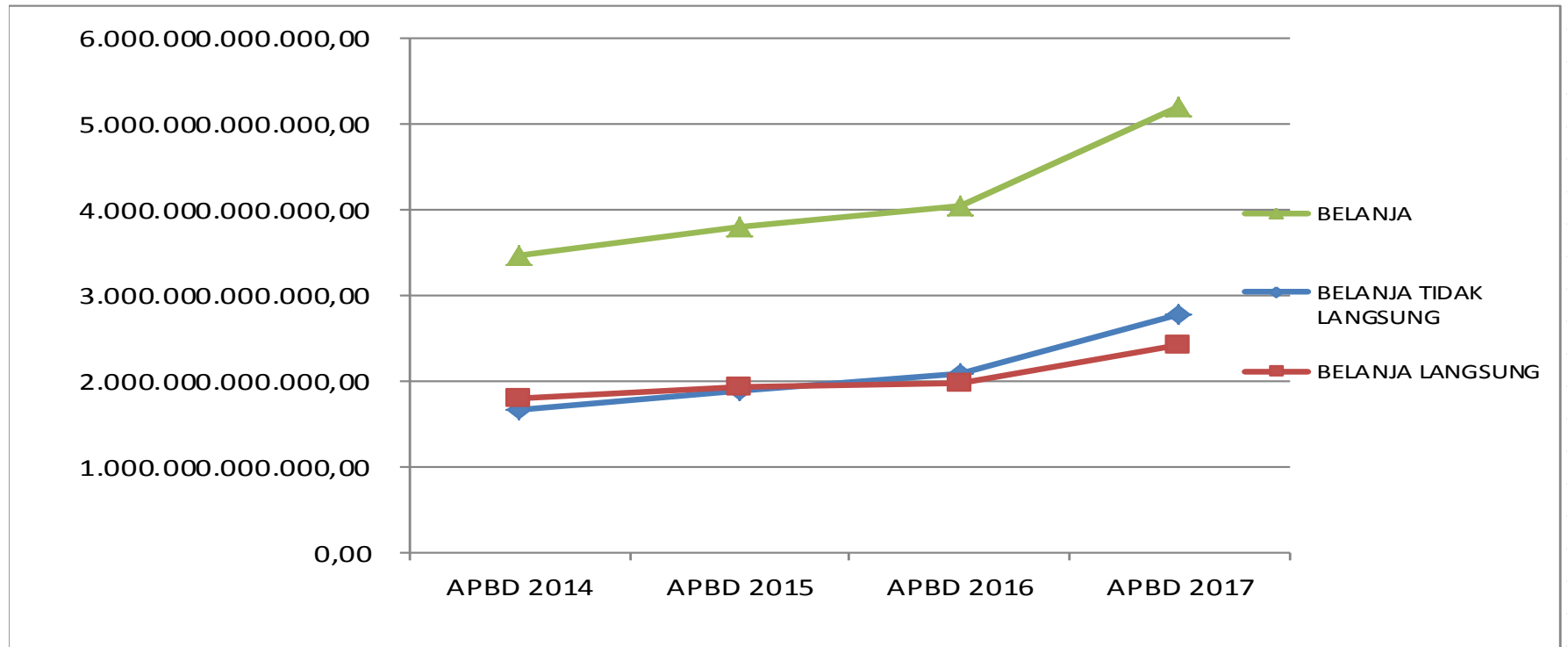


Terdapat peningkatan Dana Perimbangan sebesar Rp729.165.788.739 (42,09%),
 LLPDyS sebesar Rp 339.758.302.551 (64,14%)
 sedangkan kenaikan PAD sebesar Rp13.788.923.556,83(0,84%)
 pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016

BELANJA DAERAH

Perkembangan Belanja Daerah DIY Tahun 2014 – 2017

	BELANJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
APBD 2014	3.466.745.462.269,77	1.663.950.552.723,10	1.802.794.909.546,67
APBD 2015	3.806.092.624.463,02	1.875.147.190.222,67	1.930.945.434.240,35
APBD 2016	4.039.848.730.885,60	2.077.792.555.106,60	1.962.056.175.779,00
APBD 2017	5.200.386.011.001,43	2.779.012.765.965,93	2.421.373.245.035,50



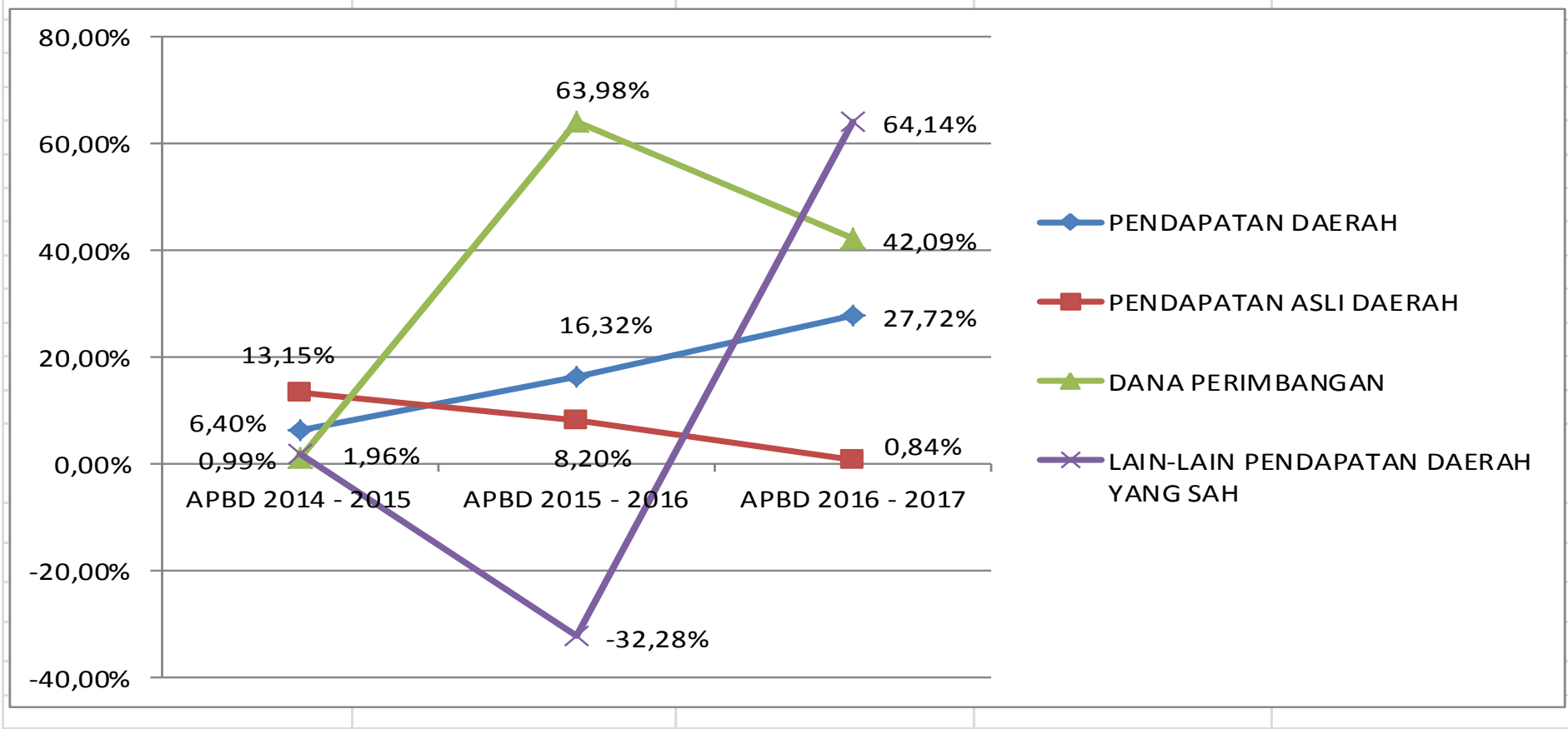
Tahun 2017 dibandingkan tahun 2016: Keseluruhan Belanja meningkat Rp116.0537.280.115,83 (28,73%) dengan rincian

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp701.220.210.859,33 (33,75%)
- Belanja Langsung sebesar Rp459.317.069.256,50 (23,41%)

PENDAPATAN DAERAH

Perkembangan Pendapatan Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 (Dalam Persen)

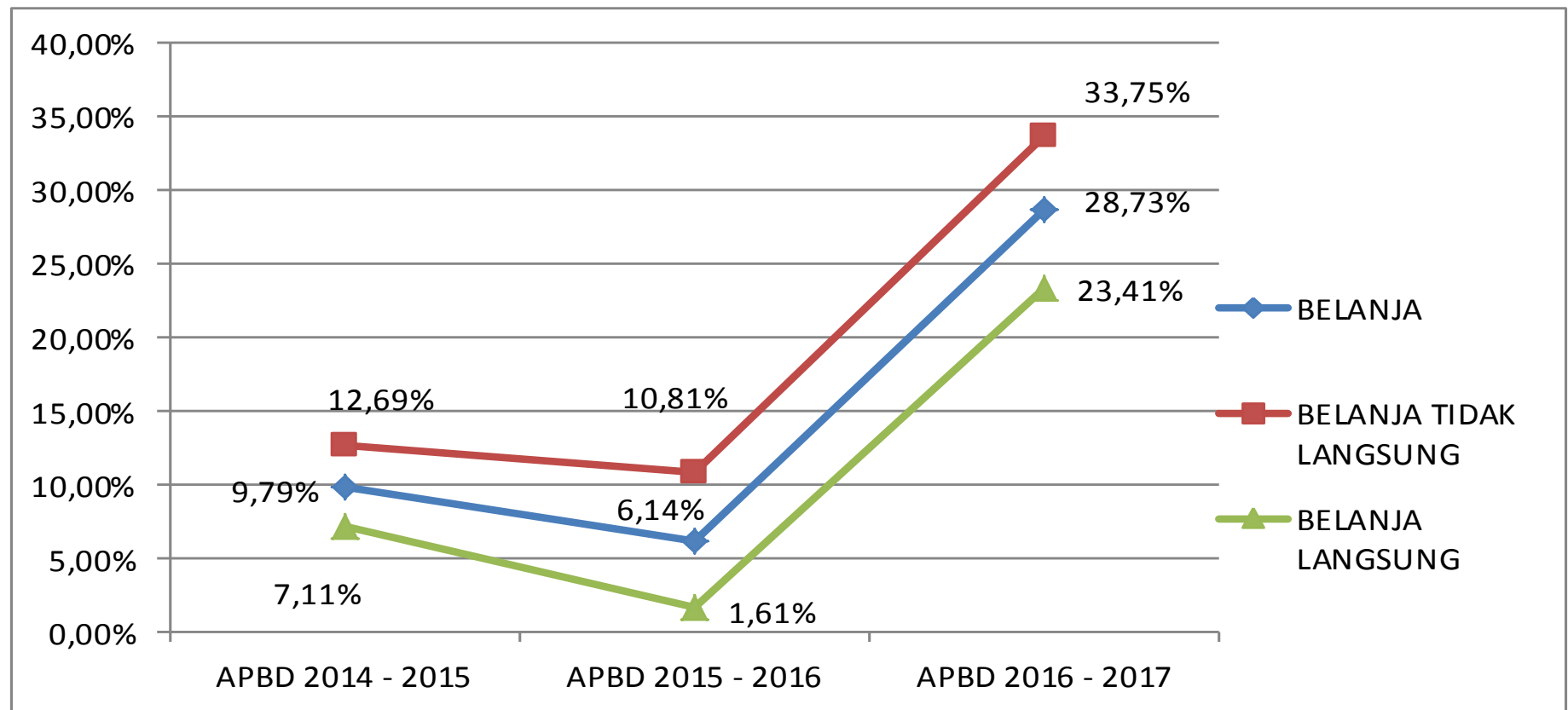
	PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
APBD 2014 - 2015	6,40%	13,15%	0,99%	1,96%
APBD 2015 - 2016	16,32%	8,20%	63,98%	-32,28%
APBD 2016 - 2017	27,72%	0,84%	42,09%	64,14%



BELANJA DAERAH

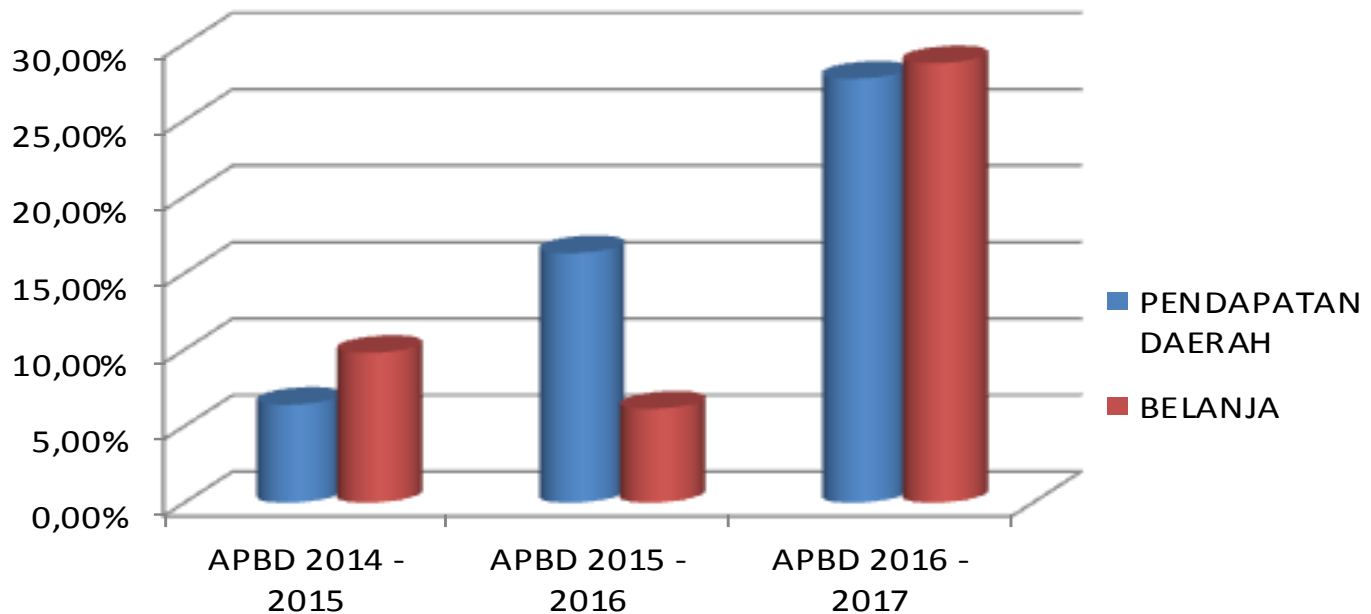
Perkembangan Belanja Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 (Dalam Persen)

	BELANJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
APBD 2014 - 2015	9,79%	12,69%	7,11%
APBD 2015 - 2016	6,14%	10,81%	1,61%
APBD 2016 - 2017	28,73%	33,75%	23,41%



Perbandingan Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 (Dalam Persen)

	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA
APBD 2014 - 2015	6,40%	9,79%
APBD 2015 - 2016	16,32%	6,14%
APBD 2016 - 2017	27,72%	28,73%

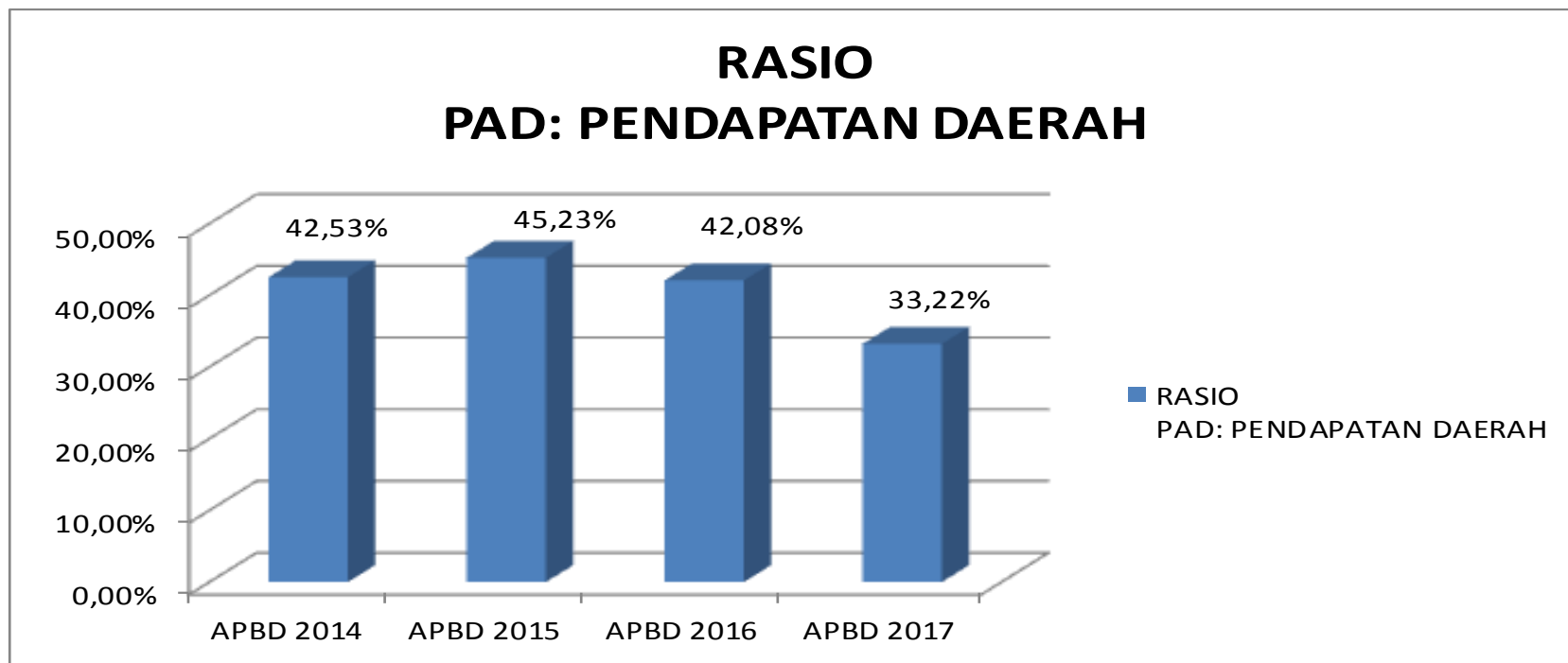


- Pada tahun 2014 – 2015 kenaikan pendapatan lebih kecil dibandingkan kenaikan belanja sebesar 3,39%
- Pada tahun 2015 – 2016 kenaikan belanja menurun dibandingkan tahun 2014 - 2015

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah Tahun 2014 – 2017

	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN DAERAH (PD)	RASIO PAD: PENDAPATAN DAERAH
APBD 2014	1.342.290.475.580,27	3.155.760.939.182,27	42,53%
APBD 2015	1.518.860.030.656,77	3.357.761.886.230,77	45,23%
APBD 2016	1.643.358.958.571,80	3.905.666.302.867,80	42,08%
APBD 2017	1.657.147.882.128,63	4.988.379.317.714,63	33,22%

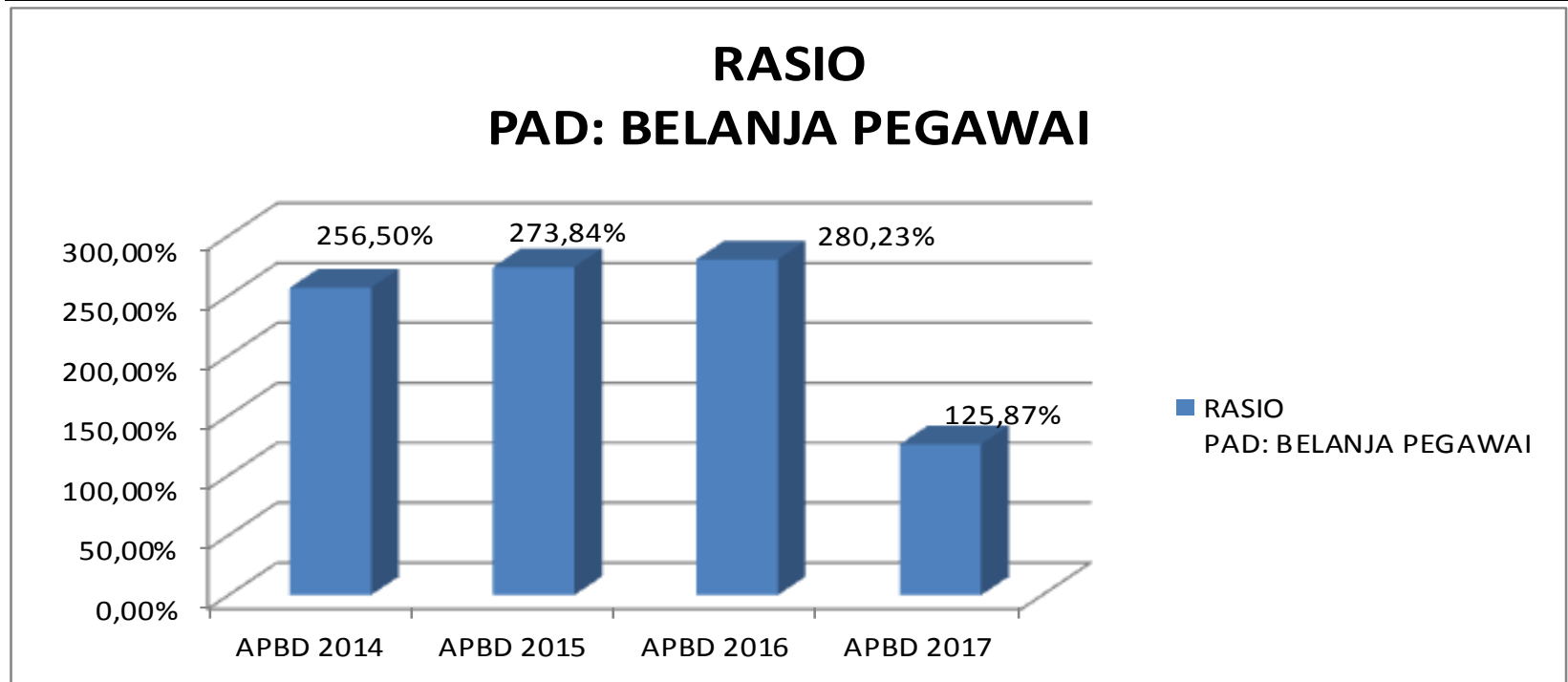


Pendapatan Daerah meningkat pada Tahun 2017 dikarenakan terjadi peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah lebih signifikan dibandingkan peningkatan PAD, sehingga Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah tahun 2017 menurun 8,86% dibanding tahun 2016

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Pegawai (pada Belanja Tidak Langsung) Tahun 2014 – 2017

	PENDAPATAN ASLI DAERAH	BELANJA PEGAWAI (BTL)	RASIO PAD: BELANJA PEGAWAI
APBD 2014	1.342.290.475.580,27	523.308.261.027,25	256,50%
APBD 2015	1.518.860.030.656,77	554.645.445.603,00	273,84%
APBD 2016	1.643.358.958.571,80	586.441.600.516,37	280,23%
APBD 2017	1.657.147.882.128,63	1.316.547.064.995,93	125,87%



Peningkatan Belanja Pegawai Tahun 2017 cukup signifikan, salah satunya disebabkan pengalihan kewenangan.

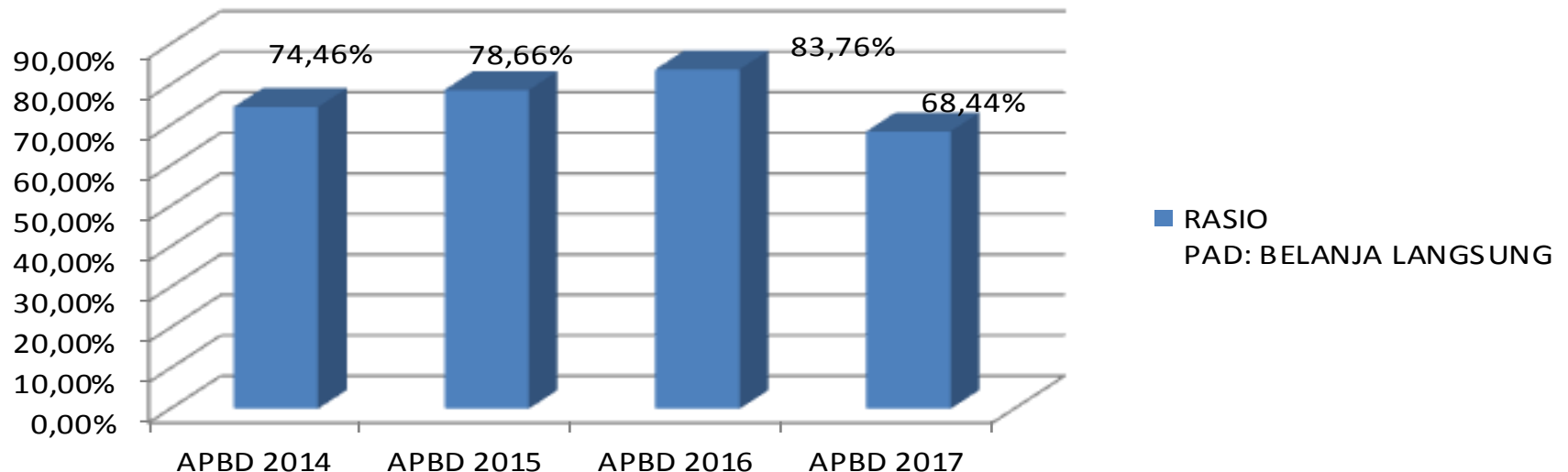
Rasio PAD:Belanja Pegawai tahun 2017 menurun 154,36 % dibanding tahun 2016

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Langsung Tahun 2014 – 2017

	PENDAPATAN ASLI DAERAH	BELANJA LANGSUNG	RASIO PAD: BELANJA LANGSUNG
APBD 2014	1.342.290.475.580,27	1.802.794.909.546,67	74,46%
APBD 2015	1.518.860.030.656,77	1.930.945.434.240,35	78,66%
APBD 2016	1.643.358.958.571,80	1.962.056.175.779,00	83,76%
APBD 2017	1.657.147.882.128,63	2.421.373.245.035,50	68,44%

RASIO PAD: BELANJA LANGSUNG



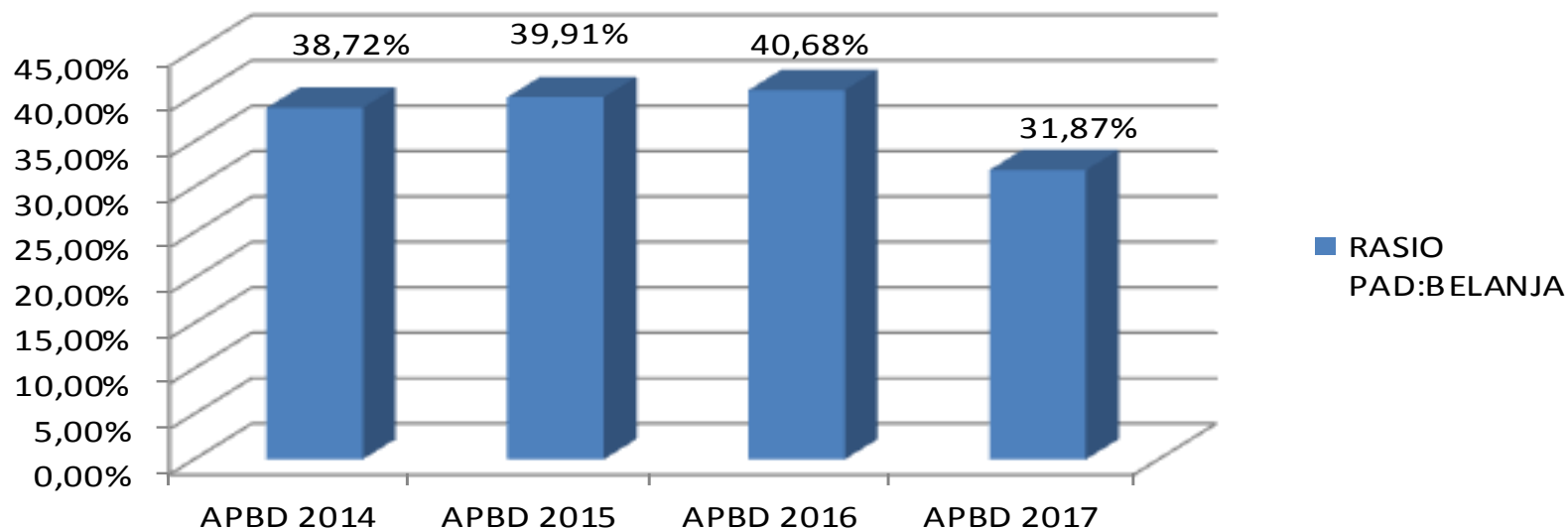
Kemampuan PAD terhadap Belanja Langsung Tahun 2017, turun 15,32%
dibanding Tahun 2016

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja APBD Tahun 2014 – 2017

	PENDAPATAN ASLI DAERAH	BELANJA	RASIO PAD:BELANJA
APBD 2014	1.342.290.475.580,27	3.466.745.462.269,77	38,72%
APBD 2015	1.518.860.030.656,77	3.806.092.624.463,02	39,91%
APBD 2016	1.643.358.958.571,80	4.039.848.730.885,60	40,68%
APBD 2017	1.657.147.882.128,63	5.200.386.011.001,43	31,87%

RASIO PAD:BELANJA



Kemampuan PAD Terhadap Belanja APBD Tahun 2017
turun 8,81% dibanding tahun 2016

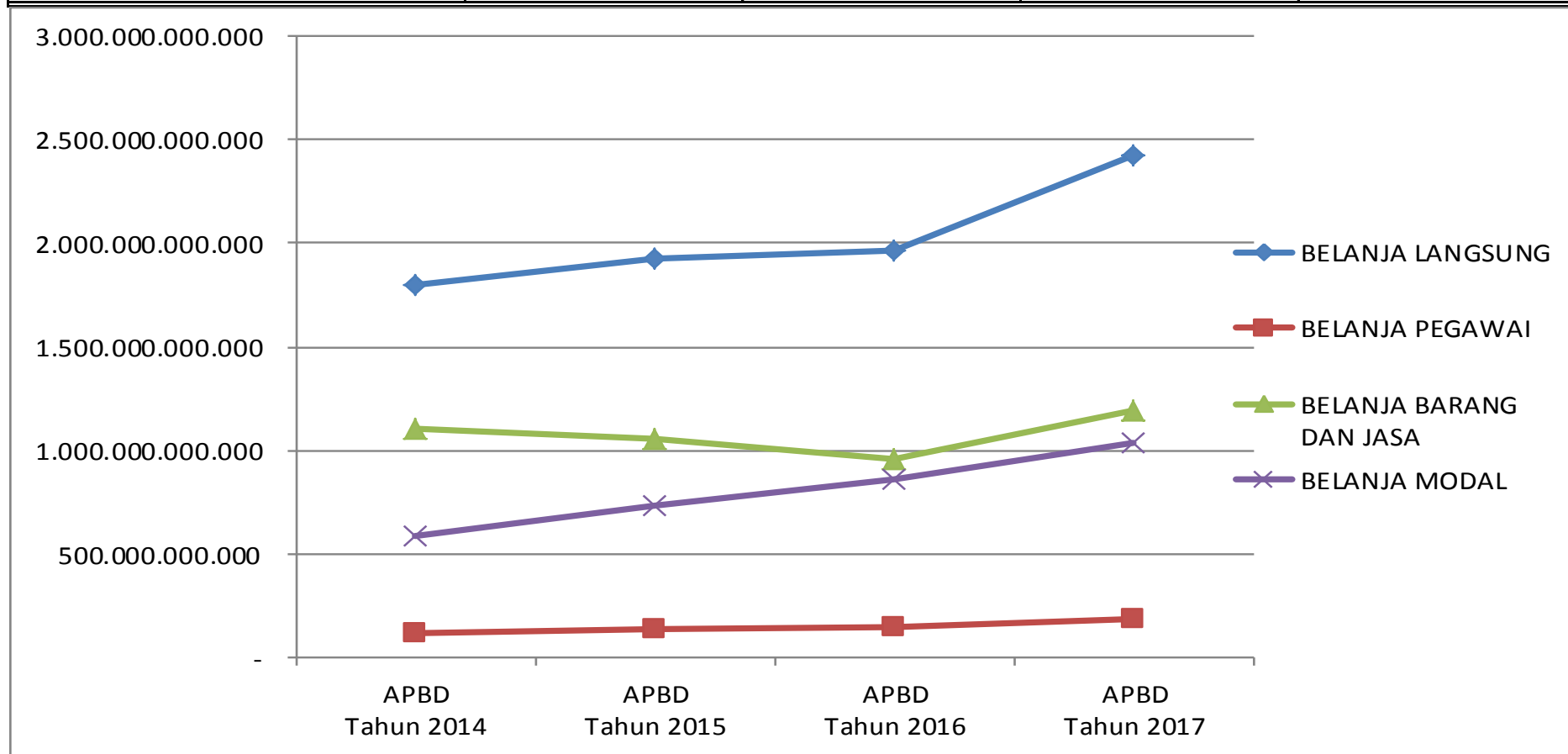
Perbandingan PENDAPATAN ASLI DAERAH terhadap:

1. APBD (2016) = 40,68%
APBD (2017) = 31,87%
→ Kemampuan PAD terhadap APBD Tahun 2017, turun 8,81% dibanding Tahun 2016
2. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai (2016) = 280,23%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai (2017) = 125,87%
→ Kemampuan PAD terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2017, turun 154,36% dibanding Tahun 2016
3. Belanja Tidak Langsung (Di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai) (2016) = 110,19%
Belanja Tidak Langsung (Di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai) (2017) = 113,31%
→ Kemampuan PAD terhadap Belanja Tidak Langsung (Di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai) Tahun 2017, naik 3,12% dibanding Tahun 2016
4. Belanja Langsung (2016) = 83,76%
Belanja Langsung (2017) = 68,44%
→ Kemampuan PAD terhadap Belanja Langsung Tahun 2017, turun 15,32% dibanding Tahun 2016

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan Jenis Belanja APBD Tahun 2014 – 2017

	APBD Tahun 2014	APBD Tahun 2015	APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017
BELANJA LANGSUNG	1.802.794.909.547	1.930.945.434.240	1.962.056.175.779	2.421.373.245.036
BELANJA PEGAWAI	119.273.305.603	139.328.480.233	144.668.401.677	185.780.385.232
BELANJA BARANG DAN JASA	1.099.717.364.860	1.059.085.052.193	954.771.140.045	1.195.029.682.728
BELANJA MODAL	583.804.239.084	732.531.901.814	862.616.634.057	1.040.563.177.076



KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

APBN 2017: DANA PERIMBANGAN

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

DITINGKATKAN DAN DIDORONG SEOPTIMAL MUNGKIN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

ALOKASI MEMPERHITUNGGAN PENGALIHAN URUSAN SMA/ SMK/URUSAN LAIN

PERLU REKONSILIASI DATA LEBIH CERMAT UTK PERHITUNGAN APBDP 2017

PAGU DAU NASIONAL TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU DAPAT BERUBAH SESUAI PERUBAHAN PDN NETO

IMPLIKASI: DAERAH HARUS MENYUSUN STRATEGI PENYESUAIAN DALAM APBDP 2017

IMPLIKASI: PENYESUAIAN KONTRAK, BELANJA OPERASIONAL / MODAL

SOLUSI: FLEKSIBILITAS KONTRAK/ CASH PLANNING

MINIMAL 25% DAU DAN DBH DIGUNAKAN UNTUK INFRASTRUKTUR

KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH

PAD

- Peningkatan Pendapatan?

Pendapatan

BELANJA

- Pengurangan Belanja atau Efisiensi Belanja

Belanja

MULTI YEARS

OBLIGASI

HUTANG

Pembiayaan

PROYEKSI RAPBD 2018

Pendapatan

U R A I A N	TAHUN 2018
PENDAPATAN	4.805.557.720.391,33
<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	<i>1.680.234.724.613,93</i>
Pendapatan Pajak Daerah	1.503.975.049.534,30
Pendapatan Retribusi Daerah	35.567.049.740,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	75.639.486.244,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.053.139.095,19
<i>DANA PERIMBANGAN</i>	<i>2.274.397.213.000,00</i>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.055.112.000,00
Dana Alokasi Umum	1.312.215.989.000,00
Dana Alokasi Khusus	833.126.112.000,00
- DAK Fisik	-
- DAK Non Fisik	833.126.112.000,00
<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>850.925.782.777,40</i>
Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	800.000.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	36.098.589.930,40
JUMLAH PENDAPATAN	4.805.557.720.391,33

PROYEKSI RAPBD 2018

Belanja

U R A I A N	TAHUN 2018
BELANJA	4.961.472.593.254,56
<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG</i>	2.661.925.919.716,89
Belanja Pegawai	1.449.101.300.010,00
Belanja Bunga	10.079.680.787,00
Belanja Subsidi	77.000.000.000,00
Belanja Hibah	487.880.200.000,00
Belanja Bansos	1.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	621.864.738.919,89
Bantuan Keuangan	-
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
<i>BELANJA LANGSUNG</i>	2.299.546.673.537,67
JUMLAH BELANJA	4.961.472.593.254,56
SURPLUS/(DEFISIT)	(155.914.872.863,23)
	-3,24%

PROYEKSI RAPBD 2018

Pembiayaan

U R A I A N	TAHUN 2018
PEMBIAYAAN	
<i>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</i>	355.164.872.863,23
SILPA	85.164.872.863,23
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	270.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang Daerah	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana	-
Penerimaan dari Penyusutan	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	355.164.872.863,23
<i>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</i>	199.250.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal	191.250.000.000,00
Pembayaran Hutang	-
Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00
DPAL	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	199.250.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	155.914.872.863,23
SILPA TAHUN BERKENAAN	-

PROYEKSI RAPBD 2018

Alokasi Belanja Langsung 2017 dibandingkan proyeksi 2018

	TA 2017	TA 2018
Belanja Langsung	2.779.012.765.965,93	2.299.546.673.537,67

Alokasi Wajib	1.275.588.973.468,60	1.170.747.970.011,50
- Pajak Rokok	30.282.484.350,00	31.402.200.879,00
- DBH CHT	5.982.009.600,00	3.923.474.100,00
- DANA KEISTIMEWAAN	747.000.000.000,00	800.000.000.000,00
- PKB	62.699.000.000,00	96.201.278.514,00
- PBBKB	38.600.000.000,00	27.300.000.000,00
- PAP	2.850.000.000,10	14.250.000,00
- BLUD	96.080.566.518,50	96.080.566.518,50
- WISMP	6.312.097.000,00	-
- DID	53.998.349.000,00	-
- DAK	115.958.267.000,00	-
- BOS SMA/SMK	115.826.200.000,00	115.826.200.000,00
Alokasi Lainnya	1.503.423.792.497,33	1.128.798.703.526,17

Kemampuan keuangan untuk belanja langsung lainnya (di luar earmark)
pada tahun 2018 turun sebesar 374.625.088.971,16 (24,92%)
bila dibandingkan tahun 2017

Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018
dengan APBD 2016 dan 2017

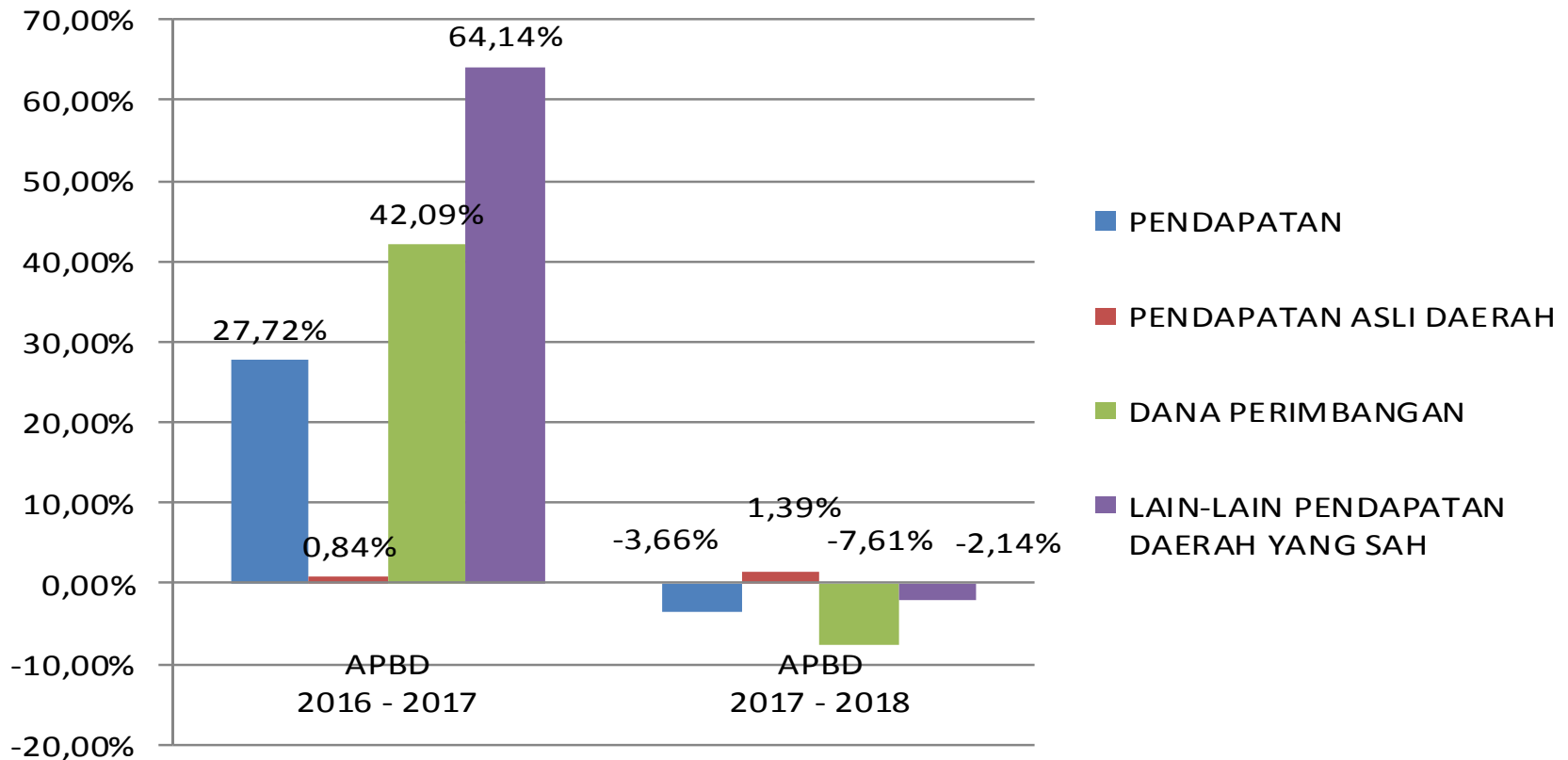
Pendapatan

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017	Tambah / (Kurang)	Proyeksi RAPBD Tahun 2018	Tambah / (Kurang)
1	2	3	4	5=(4-3)	6	7=(6-4)
1.	PENDAPATAN	3.905.666.302.867,80	4.988.379.317.714,63	1.082.713.014.846,83	4.805.557.720.391,33	(182.821.597.323,30)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.643.358.958.571,80	1.657.147.882.128,63	13.788.923.556,83	1.680.234.724.613,93	23.086.842.485,30
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1.424.186.479.922,00	1.437.942.970.424,00	13.756.490.502,00	1.503.975.049.534,30	66.032.079.110,30
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.637.651.033,00	38.797.469.715,00	1.159.818.682,00	35.567.049.740,00	(3.230.419.975,00)
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPSAHKAN	57.368.821.720,85	59.711.579.867,44	2.342.758.146,59	75.639.486.244,44	15.927.906.377,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	124.166.005.895,95	120.695.862.122,19	(3.470.143.773,76)	65.053.139.095,19	(55.642.723.027,00)
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.732.575.255.000,00	2.461.741.043.739,00	729.165.788.739,00	2.274.397.213.000,00	(187.343.830.739,00)
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	123.533.815.000,00	132.300.017.047,00	8.766.202.047,00	129.055.112.000,00	(3.244.905.047,00)
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	940.835.434.000,00	1.380.356.647.692,00	439.521.213.692,00	1.312.215.989.000,00	(68.140.658.692,00)
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	668.206.006.000,00	949.084.379.000,00	280.878.373.000,00	833.126.112.000,00	(115.958.267.000,00)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	529.732.089.296,00	869.490.391.847,00	339.758.302.551,00	850.925.782.777,40	(18.564.609.069,60)
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10.934.617.600,00	14.827.192.847,00	3.892.575.247,00	14.827.192.847,00	0,00
1.3.2.	DANA DARURAT	0,00		0,00		0,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00		0,00		0,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	518.205.064.166,00	853.998.349.000,00	335.793.284.834,00	800.000.000.000,00	(53.998.349.000,00)
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	592.407.530,00	664.850.000,00	72.442.470,00	36.098.589.930,40	35.433.739.930,40
	JUMLAH PENDAPATAN	3.905.666.302.867,80	4.988.379.317.714,63	1.082.713.014.846,83	4.805.557.720.391,33	(182.821.597.323,30)

Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018
dengan APBD 2016 dan 2017

Pendapatan (Persen)

Nomor Urut	Uraian	APBD 2016 - 2017	APBD 2017 - 2018
1.	PENDAPATAN	27,72%	-3,66%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,84%	1,39%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	42,09%	-7,61%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64,14%	-2,14%



Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018
dengan APBD 2016 dan 2017

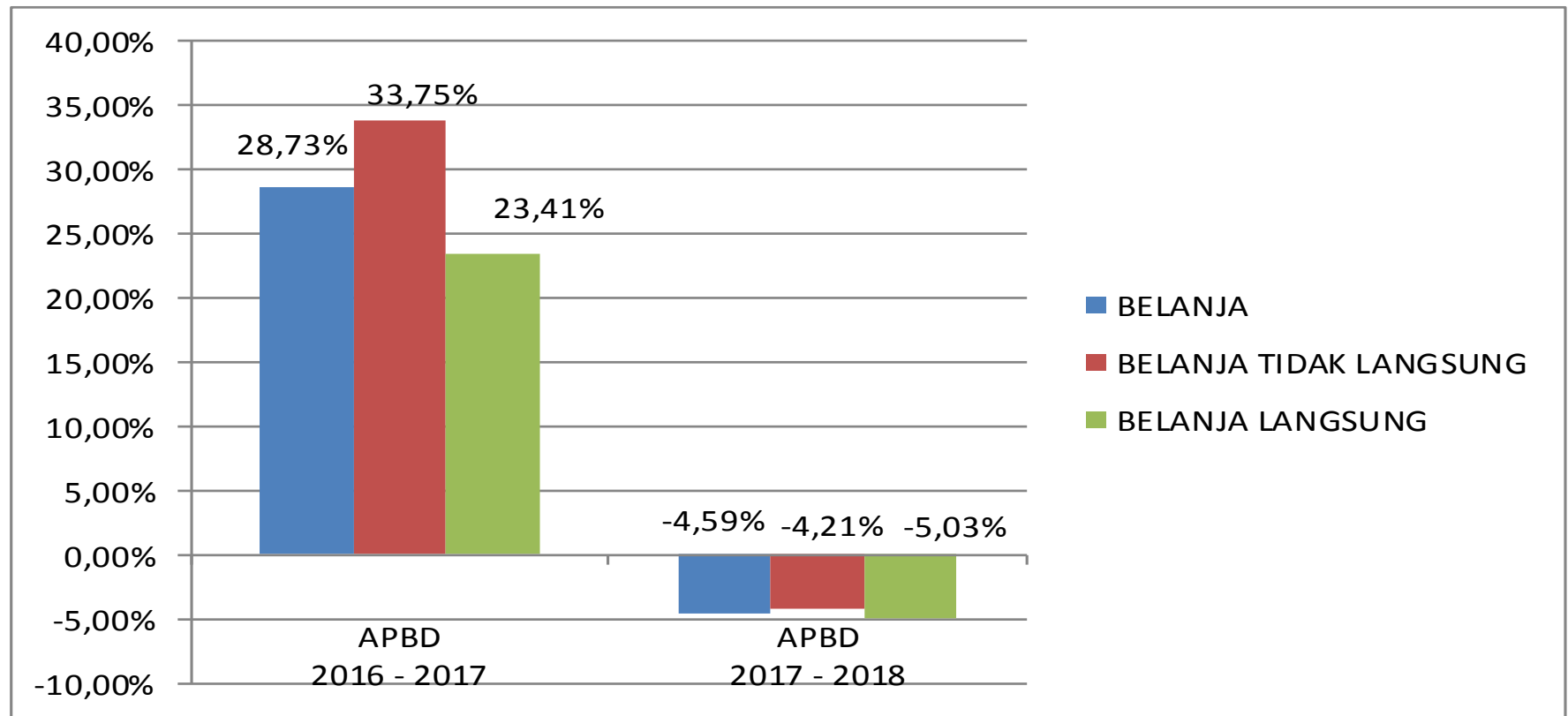
Belanja

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017	Tambah / (Kurang)	Proyeksi RAPBD Tahun 2018	Tambah / (Kurang)
1	2	3	4	5=(4-3)	6	7=(6-4)
2.	BELANJA	4.039.848.730.885,60	5.200.386.011.001,43	1.160.537.280.115,83	4.961.472.593.254,56	(238.913.417.746,87)
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.077.792.555.106,60	2.779.012.765.965,93	701.220.210.859,33	2.661.925.919.716,89	(117.086.846.249,04)
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	586.441.600.516,37	1.316.547.064.995,93	730.105.464.479,56	1.449.101.300.010,00	132.554.235.014,07
2.1.2.	BELANJA BUNGA	0,00		0,00	10.079.680.787,00	10.079.680.787,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00		0,00	77.000.000.000,00	77.000.000.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	739.110.270.983,00	719.522.034.000,00	(19.588.236.983,00)	487.880.200.000,00	(231.641.834.000,00)
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.683.000.000,00	2.091.000.000,00	(592.000.000,00)	1.000.000.000,00	(1.091.000.000,00)
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMDES	611.852.157.746,18	601.307.079.296,80	(10.545.078.449,38)	621.864.738.919,89	20.557.659.623,09
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROVINSI/ KAB/KOTA DAN PEMDES	87.863.277.816,00	114.625.862.931,00	26.762.585.115,00	0,00	(114.625.862.931,00)
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.842.248.045,05	24.919.724.742,20	(24.922.523.302,85)	15.000.000.000,00	(9.919.724.742,20)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.962.056.175.779,00	2.421.373.245.035,50	459.317.069.256,50	2.299.546.673.537,67	(121.826.571.497,83)
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.668.401.677,00	185.780.385.232,00	41.111.983.555,00		
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	954.771.140.045,00	1.195.029.682.728,00	240.258.542.683,00		
2.2.3.	BELANJA MODAL	862.616.634.057,00	1.040.563.177.075,50	177.946.543.018,50		
	JUMLAH BELANJA	4.039.848.730.885,60	5.200.386.011.001,43	1.160.537.280.115,83	4.961.472.593.254,56	(238.913.417.746,87)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(134.182.428.017,80)	(212.006.693.286,80)	(77.824.265.269,00)	(155.914.872.863,23)	56.091.820.423,57

Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018
dengan APBD 2016 dan 2017

Belanja (Persen)

Nomor Urut	Uraian	APBD 2016 - 2017	APBD 2017 - 2018
2.	BELANJA	28,73%	-4,59%
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33,75%	-4,21%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	23,41%	-5,03%



Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018
dengan APBD 2016 dan 2017

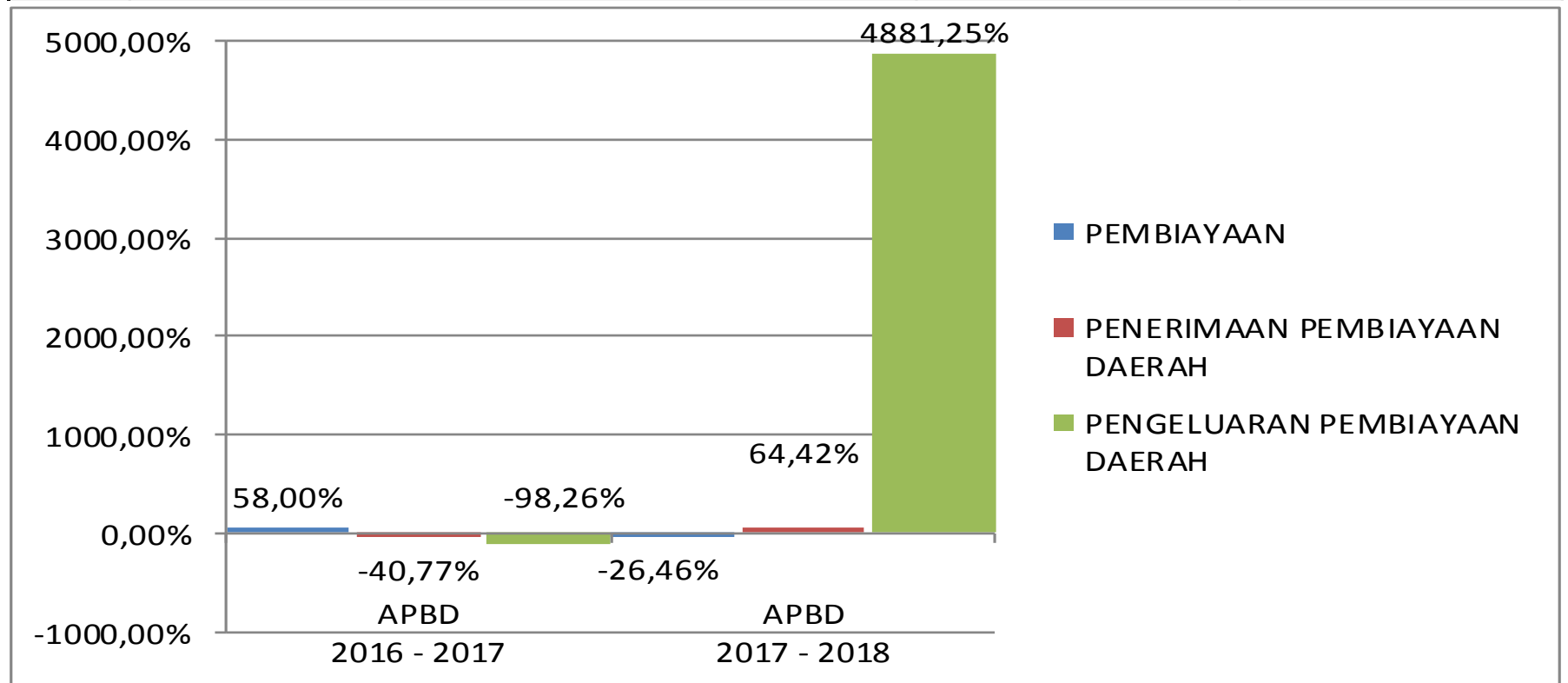
Pembiayaan

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017	Tambah / (Kurang)	Proyeksi RAPBD Tahun 2018	Tambah / (Kurang)
1	2	3	4	5=(4-3)	6	7=(6-4)
3.	PEMBIAYAAN	134.182.428.017,80	212.006.693.286,80	77.824.265.269,00	155.914.872.863,23	(56.091.820.423,57)
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	364.682.428.017,80	216.006.693.286,80	(148.675.734.731,00)	355.164.872.863,23	139.158.179.576,43
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	364.682.428.017,80	216.006.693.286,80	(148.675.734.731,00)	85.164.872.863,23	(130.841.820.423,57)
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	270.000.000.000,00	270.000.000.000,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8.	PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.682.428.017,80	216.006.693.286,80	(148.675.734.731,00)	355.164.872.863,23	139.158.179.576,43
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	230.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(226.500.000.000,00)	199.250.000.000,00	195.250.000.000,00
3.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	230.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(226.500.000.000,00)	191.250.000.000,00	187.250.000.000,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
3.2.5.	PENYELESAIAN KEGIATAN D P A - L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6.	PEMBAYARAN KEWAJIBAN TAHUN LALU YANG BELUM TERSELESAIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	230.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(226.500.000.000,00)	199.250.000.000,00	195.250.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	134.182.428.017,80	212.006.693.286,80	77.824.265.269,00	155.914.872.863,23	(56.091.820.423,57)
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018
dengan APBD 2016 dan 2017

Pembiayaan (Persen)

Nomor Urut	Uraian	APBD 2016 - 2017	APBD 2017 - 2018
3.	PEMBIAYAAN	58,00%	-26,46%
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-40,77%	64,42%
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-98,26%	4881,25%



TERIMA KASIH

Yogyakarta
The Heart of Java

Our rhyme is mantra
Flows down like lava
Our culture is weapon

~Song Of Sabdatama~

